

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asyhadie, H. Zaeni., Rahman, Arief., Mualifah, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Grafika Aditama, Jakarta.
- Burton, Richard dan B. Ilyas . Wirawan, 2008, Hukum Pajak, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Ichsan, Achmad, 1969, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Joeniarto, 1991, Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tatanegara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Judisseno, R.K, 2005, Pajak dan Strategi Bisnis 1, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Manan, Bagir, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, IND-HILL.CO, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muljadi, Kartini., Widjaja, Gunawan, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali, Jakarta.
- Pandiagan, Roristua, 2015, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2005, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2010, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Soehino, 2005, Hukum Tatanegara Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat., Sugiharti, Dewi Kania 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.

Soeroso, R, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan kedua belas, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Subekti, R, 1992, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesembilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R., Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

JURNAL

Gutman, Harry L., “The Role of the Tax Advisor in Changing World of Global Tax Administration, Tax Lawyer”, American College, Vol. 65, No. 3, 2012.

Latumeten, Pieter E, 2017, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmacht dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1(2017): 1-37, 2017.

Susanto, Lusiana, Tjondro, Elisa, “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Konsultan Pajak Dan Preferensi Wajib Pajak Dalam Memilih Konsultan Pajak: Honest Consultant, Creative Consultant dan Cautious Consultant”, Tax and Accounting Review, Vol.3, No.2, 2013.

Thuronyi, Victor, Vanistendael, “Tax Law Design and Drafting”, Chapter 5, Regulation of Tax Professionals, International Monetary Fund, Vol.1, 1996.

ARTIKEL

Bundessteuerberaterkammer, “Professional Rules and Practice Guidelines of Chamber of Tax Advisors (BOSTB)”, an English translation of the information on Chamber of Tax Advisors and the profession of tax adviser-Federal Chamber of Tax Adviser, Behrenstraße 42, Berlin, 2012.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, “The Tax Advisor And The Right Of Non-Disclosure”, Netherlands, 2012.

OECD General Administrative Principles – GAP002 Taxpayers’ Rights and Obligation, 1990

Vos, Roelof, “Mediating Tax Dispute in the Netherlands”, Article, Dutch-Flemish Magazine for Mediation and Conflict Management, (18) 3, 2014.

INTERNET

Hendri Firzani dan Aditya Kirana, “Yustinus Praswoto: Kekosongan Hukum Bisa Merugikan Wajib Pajak”, Gatra.com, 30 April 2018.

Prastowo, Yustinus, “Quo Vadis Konsultan Pajak Indonesia? Catatan Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, CITA.or.id, Jakarta, 13 Mei 2018.

Qur’ani, Hamalatul 2018, “Beda Kuasa Hukum dengan Kuasa Wajib Pajak serta Perdebatan Pasca Putusan MK”, Hukum Online, 17 Mei 2018.

Suwiknyo, Edi, “PERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi”, Bisnis.com, 29 April 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268).

Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 729)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1930).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 April 2018.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2008 tentang Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Khusus;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.

WAWANCARA

Cahyono, Doni Hendro, Kutipan Wawancara melalui alamat e-mail donyhen@gmail.com, Advokat, Kantor Hukum Dr. Soeparman, Senin 12 Februari 2019, Jakarta.

Drs. Agus Sambodo, S.H., MSA., BKP., Kutipan Wawancara melalui telepon , Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cbg. Malang, Jum'at 15 Februari 2019

KAMUS

Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Professional Rules and Practice Guidelines of Chamber of Tax Advisors (BOSStB).